

PEMBANGUNAN MELALUI KOLABORASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Oleh
Dwi Harsono
FISE UNY

Abstrak

Pembangunan di Negara berkembang sering mengalami kegagalan. Hal ini dicurigai sebagai akibat dari faktor internal negara tersebut. Penduduk negara berkembang kurang memiliki budaya ilmiah sehingga kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologinya (iptek/ S&T) lemah. Implikasinya adalah kurangnya investasi yang dikeluarkan untuk penguasaan S&T.

Iptek berkembang pesat di negara maju sehingga aplikasi di negara berkembang mengalami kendala. Negara maju dan negara berkembang harus melakukan kolaborasi pembangunan untuk mengatasi kendala yang dihadapi negara berkembang. Negara maju harus melakukan transformasi iptek yang dibutuhkan oleh negara berkembang sehingga lambat laun kapasitasnya semakin meningkat.

Terbangunnya *S&T capacity* merupakan langkah penting dalam kolaborasi pembangunan karena didalamnya terdapat *transfer of knowledge*. Transfer ini akan memperkuat *soft skill* untuk melaksanakan pembangunan. Pembentukan *soft skill* harus selaras dengan keragaman dan kearifan budaya lokal sehingga pembangunan tidak kontra produktif terhadap budaya

Kata Kunci : pembangunan, kolaborasi, ilmu pengetahuan dan teknologi

Pendahuluan

Wacana pembangunan tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Meskipun beragam model pembangunan ditawarkan tapi akan selalu muncul inovasi yang dikembangkan oleh para ahli. Inovasi baru muncul sebagai upaya untuk merumuskan bentuk pembangunan yang paling

adaptif dan mampu diadopsi oleh berbagai negara. Kondisi ini sebagai akibat dari gagalnya model pembangunan yang telah ada untuk memberikan kontribusi positif bagi negara-negara berkembang maupun terbelakang untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan penerapan model pembangunan selama ini diarahkan pada kondisi internal negara-negara berkembang maupun terbelakang tersebut. Hal ini terjadi karena pembangunan merupakan adopsi atas keberhasilan yang terjadi di negara-negara maju dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan harus mengacu kepada kondisi-kondisi yang ada dan terjadi di negara-negara maju. Ketika negara berkembang tidak memiliki kesiapan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi maka model pembangunan tersebut tidak dapat diterapkan. Di samping ketiadaan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan di negara berkembang, faktor lain yang sangat penting adalah ketiadaan model yang bersifat menjembatani kebutuhan negara berkembang dengan kontribusi yang bisa diberikan negara maju untuk pembangunan.

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Model pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pertumbuhan dan sudah berlangsung sejak tahun 1971 (Rencana Pembangunan Lima Tahun I/Repelita) dan menunjukkan angka yang meyakinkan. Bahkan pada semester pertama tahun 1997 sebagai akibat dari keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi, rembesan peng-

hasilan, dan pengentasan kemiskinan, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah bawah dengan *income per capita* mencapai \$US 1.100. Namun akibat krisis pasar uang di Asia telah membuka kelemahan struktural dari model pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sehingga berubah menjadi krisis politik, ekonomi, dan sosial dalam waktu beberapa bulan (Holloh, 2001:7).

Upaya reformasi telah dilakukan bahkan termasuk dengan meminta bantuan kepada lembaga-lembaga donor (Bank Dunia dan IMF). Pemerintah Indonesia telah mengikuti paket penyesuaian struktural yang disodorkan oleh lembaga-lembaga donor sebagai syarat pencairan bantuan. Pada tahun 2000, dengan bantuan IMF, Indonesia menetapkan *10 Point Economic Recovery Program* (Holloh, 2001:9) yang terdiri dari 1) *Maintaining macroeconomic stability*; 2) *Reducing unemployment*; 3) *Improving agricultural productivity and farmer welfare*; 4) *Increasing non-oil export revenues*; 5) *Promoting domestic and foreign equity investment*; 6) *Expediting banking and corporate restructuring*; 7) *Accelerating privatization of state-owned enterprises*; 8) *Initiating small and medium scale enterprises development programs*; 9) *Ensuring sustainable development of natural*

resources; 10) Implementing economic decentralization. Pemerintah juga telah menetapkan paket kebijakan untuk melawan korupsi dengan mengeluarkan undang-undang pemberantasan korupsi, peningkatan struktur administrasi dalam pengambilan keputusan sehingga governance bisa tercapai, serta memperkuat lembaga-lembaga publik. Namun hingga tahun 2006 belum menampakkan hasil yang diharapkan. Bahkan menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia tahun 2006 mencapai 109 juta jiwa (49,5%) apabila dihitung berdasarkan konsumsi per hari US\$ 2 (Andi, 2006).

Semakin besarnya angka kemiskinan merupakan indikator sejauhmana keberhasilan pembangunan di Indonesia. Ukuran konsumsi US\$ 2 per hari menggambarkan tentang tingkat pendapatan yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat. Padahal kemiskinan tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan. Menurut SMERU (2002:2), kemiskinan harus dilihat dari dimensi-dimensi yang melingkupinya. Dimensi-dimensi kemiskinan adalah 1) kerentanan, 2) ketidakberdayaan, dan 3) ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (*voicelessness*). Dengan dimensi-dimensi tersebut kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi tapi juga aspek lain seperti politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kelembagaan.

Kerentanan adalah kondisi dimana masyarakat memiliki resiko tinggi untuk miskin akibat adanya gejolak ekonomi. Tanpa gejolak ekonomi, masyarakat miskin telah hidup pas-pasan. Apabila terjadi gejolak sudah pasti akan jatuh miskin. Ketidakberdayaan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses atas keberhasilan pembangunan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki di samping pendapatan keluarga yang sedikit. *Voicelssness* terjadi ketika masyarakat tidak memiliki peluang untuk menyuarkan aspirasinya sehingga yang terjadi adalah apatisme terhadap kondisi di sekitarnya.

Menurut Suwarsono dan Alvin Y. So, muara dari pembangunan adalah adanya perubahan sosial yang mengarah pada kondisi yang lebih baik (Suwarsono dan So, 1991). Perubahan sosial bisa berbentuk pada pergeseran maupun perubahan nilai dasar masyarakat menjadi lebih baik. Namun yang perlu dipahami adalah tidak semua nilai yang dimiliki masyarakat di negara berkembang adalah buruk sehingga yang terjadi tidak harus adopsi atau internalisasi nilai baru. Pembangunan di Indonesia masih berjalan terus dan muara dari pembangunan belum tampak. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah perubahan sosial

seperti apa yang harus menjadi arah pembangunan di Indonesia dan modifikasi apa yang bisa dilakukan sehingga model yang dijalankan menjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Pembangunan

Menurut Bryant dan White (1989:21-22), pembangunan diartikan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Peningkatan kapasitas terjadi pada aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan iptek. Dalam hal ini pembangunan berarti menyangkut kapasitas bangsa dan komunitas untuk membangun lembaga-lembaga yang menyangkut seluruh aspek tersebut dan bertanggung jawab untuk melakukan alokasinya kepada masyarakat.

Besarnya tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan menuntut adanya perencanaan atas keseluruhan langkah yang akan diambil. Masuk akal apabila di negara-negara berkembang kemudian muncul upaya untuk melakukan administrasi atas pembangunan yang dijelankannya. Administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka *nation building* (Siagian dalam Bintoro, 1972:1-2). *Nation building* menyangkut keseluruhan as-

pek yang menjadi tanggung jawab negara kepada dan berpengaruh dalam proses sehingga masyarakatnya dapat terlibat secara aktif serta menjadi motor dalam pembangunan.

Peningkatan kapasitas dijalankan melalui aspek-aspek yang menjadi motor pembangunan. Menurut Bryant dan White (1989:23), aspek ekonomi dan politik memiliki porsi yang cukup besar menjadi penggerak dalam pembangunan. Meskipun ini tidak dianut oleh banyak ahli tapi kedua aspek ini memang memiliki *leverage effect* yang paling besar dalam pembangunan. Kondisi ekonomi dan politik membuka jalan lebih besar bagi berjalannya aspek lain dalam pembangunan.

Berbeda dengan Siagian yang lebih mengarahkan pembangunan pada pembentukan *nation building*. *Nation building* lebih menempatkan pada perkuatan pada aspek sosial budaya sebagai tujuan dari pembangunan (Bintoro, 1995:13). Pembangunan adalah perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi modern dengan diintrodusirnya nilai-nilai baru. Proses tersebut mengakibatkan terjadi perubahan nilai dalam seluruh aspek yang dimiliki masyarakat, terutama aspek sosial budaya karena akan tampak dalam perilaku dan etika masyarakat. Namun yang perlu untuk dicermati adalah posisi

aspek ekonomi dan politik tetap berperan sebagai *leverage factor*. *Nation building* dalam hal ini adalah output akhir sedangkan proses yang terjadi dalam pembangunan tetap menyentuh seluruh aspek yang ada.

Pembangunan sebagai peningkatan kapasitas (*nation building*) sangat mengakar dalam isu *good governance* yang diusung oleh negara-negara maju dalam membantu negara berkembang. Lembaga donor seperti Bank Dunia (1989), sebagai wakil dari negara-negara maju, mendefinisikan *governance* sebagai .. *exercise of political power to manage nation*. Menurut Pratikno (2005) hal ini merupakan tonggak perubahan orientasi Bank Dunia dari penjelasan teknokratis terhadap pembangunan menjadi penjelasan politik. Nuansa politik sangat kental dalam ciri-ciri utama *good governance* (Nasier, 2006), yaitu: 1) *Participatory*; 2) *Consensus oriented*; 3) *Accountable*; 4) *Transparent*; 5) *Responsive*; 6) *Effective and efficient*; 7) *Equitable and inclusive* 8) *Follows the rule of law*. Namun dalam praktik di negara-negara berkembang, pelaksanaan *good governance* sangat bernuansa ekonomi. Lembaga donor dalam memberikan bantuan ekonomi selalu mengusung isu *good governance* melalui Program Penyesuaian Strukturalnya. Program Penyesuaian Struktural menggeser aspek politik menjadi aspek ekonomi. Hal ini didasarkan pada butir-butir rumusan *good*

governance dalam *Washington Consensus* (Hayami dalam Pratikno, 2005:237) yang terdiri dari: 1) Disiplin Fiskal; 2) Konsentrasi belanja publik pada barang-barang publik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; 3) Reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak dengan tarif pajak yang moderat; 4) Bunga bank yang dikendalikan oleh mekanisme pasar; 5) Nilai mata uang yang kompetitif; 6) Liberalisasi perdagangan; 7) Keterbukaan terhadap investasi asing; 8) Privatisasi perusahaan negara dan daerah; 9) Deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat pasar asing atau membatasi kompetisi, kecuali yang bisa dibenarkan untuk kepentingan keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan keperluan pengawasan finansial; 10) Jaminan hukum untuk kepemilikan (*property rights*). Dalam wacana *good governance* peran aspek politik, lebih khusus lagi aspek ekonomi, sangat kentara sebagai *leverage factor* untuk melaksanakan pembangunan.

Peran aspek politik dan ekonomi dalam pembangunan secara nyata dibahas oleh William Easterly dalam bukunya *The Elusive Quest for Growth* (Easterly, 2003). Dalam bukunya Easterly menjelaskan dua langkah mendasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai barometer dalam pembangunan. Dua langkah tersebut adalah; pertama, pemerintah harus menciptakan kebijakan-kebijakan yang merespon terciptanya insentif bagi masyarakat dalam pembangunan dan kedua, insentif diarahkan pada adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara ekonomi (Easterly, 2003).

Kebijakan dalam pembangunan adalah wilayah politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Tanggung jawab pemerintah untuk mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya harus diarahkan pada upaya lanjutan yang nyata dengan membuka peluang bagi terciptanya aktivitas yang menciptakan insentif bagi masyarakat. Wujud insentif bisa beragam tapi salah satu insentif yang dapat berdampak dan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat adalah dalam bentuk peningkatan pendapatan. Easterly menambahkan bahwa peningkatan pendapatan akan berdampak pada meningkatnya daya beli. Masyarakat tidak lagi berkuat pada perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup tapi bergeser pada investasi yang memiliki dampak jangka panjang dan tujuan dari investasi yang dilakukan masyarakat pun semakin beragam. Salah satu wujud investasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari peningkatan pendapatan

adalah investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Easterly secara mendalam membahas kaitan antara pertumbuhan, peningkatan pendapatan dan investasi dalam pengetahuan dan teknologi. Salah satu indikator pembangunan adalah terciptanya pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan agregat ekonomi yang menggambarkan peningkatan kondisi ekonomi suatu negara. Mengukur pertumbuhan tidak hanya menghitung *income per capita* sebagai salah satu faktor dari kualitas hidup masyarakat tetapi juga dengan memperhatikan kemajuan teknologi yang dimiliki masyarakat tersebut. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dapat diukur dengan produktivitas pertumbuhan yang menyangkut pertumbuhan mesin-mesin, jumlah pekerja dan peningkatan kehidupan pekerja. Dalam penjelasannya, Easterly menekankan pada pentingnya kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam skema untuk meningkatkan pertumbuhan dalam pembangunan.

Capacity Building dalam Penguasaan Iptek

Kesiapan untuk melakukan pembangunan sangat dipengaruhi oleh *capacity building* yang dimiliki. *Capacity building* yang baik memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan di negara

berkembang. Keduanya dapat dilakukan secara simultan oleh negara berkembang sehingga tidak harus menunggu memiliki *capacity building* dulu baru melaksanakan pembangunan.

Menurut RAND Science and Technology (RAND, 2001), *capacity building* adalah .. *a continuous process even in the most scientifically advanced countries, although the term generally refers to efforts to enhance science in developing countries where a shorter(or no) history of investing in Science and Technology (S&T) limits their ability to solve domestic problems or participate in international level R&D* (Wagner et.al, 2001). Pengertian ini mendukung penjelasan Easterly tentang kondisi negara berkembang yang kurang memperhatikan investasi terhadap iptek sehingga lemah dalam memecahkan permasalahan internal. Meskipun fokus dari pengertian ini adalah dalam bidang penelitian dan pengembangan tapi korelasinya sangat tinggi apabila dikaitkan dengan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan. Pembangunan di negara berkembang sebagian besar kurang didukung oleh adanya informasi tentang kondisi nyata di wilayahnya sehingga menyulitkan untuk membuat perencanaan yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penguasaan iptek untuk mengoleksi data

secara ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang tepat.

Negara yang tidak memiliki riwayat pengembangan iptek, prioritas politik maupun ekonomi yang ada tidak mendukung terjadinya pola-pola ilmiah sehingga masyarakat tidak akan memiliki *soft skill* untuk mengembangkan budaya ilmiah. Dampak dari ketiadaan pengalaman untuk melakukan budaya ilmiah mengakibatkan negara-negara berkembang memiliki kemampuan iptek yang lemah. *Scientific capacity* merupakan *soft skill* yang penting dalam pembangunan dan negara-negara berkembang lemah karena secara agregat komponen indeks yang dimiliki menunjukkan nilai yang rendah. Namun hal ini tidak berarti bahwa sebuah negara lemah secara keseluruhan. Kondisi yang sering ditemui adalah terdapat negara berkembang yang memiliki kemampuan tinggi hanya dalam satu komponen dari keseluruhan komponen yang dinilai. Akibatnya *Scientific capacity* yang dimiliki oleh negara berkembang sangat beragam. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan Easterly (Easterly, 2003), masyarakat di negara berkembang sebagian besar masih berkuat pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam arti tingkat konsumsi atau bahkan membebaskan diri dari kemiskinan sehingga jumlah investasi yang dikeluarkan untuk pengu-

asaan iptek sangat kecil atau tidak ada.

Kolaborasi dalam Pembangunan

Easterly menawarkan kolaborasi dengan dua asumsi dasar yang bisa digunakan untuk meningkatkan *S&T Capacity* di negara berkembang yakni prinsip rembesan dan kesetaraan (Easterly, 2003). Rembesan adalah prinsip investasi dari pengetahuan tidak harus diperoleh dengan investasi tapi bisa melalui rembesan pengetahuan. Kasus yang dikemukakan oleh Easterly adalah bagaimana Desh Limited di Bangladesh memperoleh transfer teknologi dari Daewoo corporation dari Korea Selatan untuk mengembangkan teknologi yang bisa diadopsi sehingga lambat laun bisa mandiri.

Daewoo Cooperation bekerjasama dengan Desh Limited dalam bentuk penanaman modal untuk pelatihan dan pembelian mesin-mesin produksi tekstil. Pekerja diberi pelatihan dan dipersiapkan untuk menguasai keahlian sebagai operator mesin yang akan didatangkan. Setelah berproduksi, Desh Limited bertugas menjadi suplayer produk tekstil kepada Daewoo. Setelah Desh Limited dianggap mampu untuk mandiri, Daewoo kemudian melepaskan diri dari kerjasama

Indonesia memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan konsep kolaborasi dalam pembangunan. Mengingat banyak mahasiswa

Indonesia yang memperoleh pendidikan yang baik di luar negeri sehingga Indonesia memiliki indeks yang cukup baik pada aspek pendidikan dari negara-negara maju (Wagner et.al, 2001). Kelompok ini harus melakukan diseminasi atas iptek yang diperoleh kepada sejawatnya di Indonesia di samping juga selalu menjaga kontak dengan almama-ternya sehingga di masa men-datang kerjasama yang terjadi bisa menjadi jejaring yang kuat dan lambat laun *soft skill* yang dimiliki menjadi kuat. Kolaborasi secara *bottom up* harus didukung oleh kemampuan dari ahli-ahli lokal untuk merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal di Indonesia.

Sebuah contoh kasus menarik berhasil dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pandeglang dengan mengadakan program pelatihan dan bantuan alat cetak bagi perajin batu bata tradisional di wilayahnya (SMERU, 2002). Perajin diberi pelatihan tentang pengelolaan usaha kecil yang baik dan pengenalan terhadap teknologi tepat guna yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dimiliki. Dalam kegiatan ini dinas perindustrian lebih memilih untuk menginvestasikan dana yang dimiliki untuk peningkatan kapasitas perajin dalam penguasaan iptek. Adanya introduksi teknologi kini

mereka mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas batu bata yang dihasilkan. Kualitas produksi se-makin baik, produk mereka diminati oleh pasar yang lebih luas hingga ke luar kecamatan bahkan ke Kabupaten Serang. Jumlah produksi meningkat hampir dua kali lipat, menjadi sekitar 1.500 buah/minggu dengan harga jual Rp175/buah. Kini penerimaan bersih mereka bisa mencapai Rp150.000/minggu. Kondisi ini sekaligus mengubah industri yang tadinya bersifat sampingan menjadi mata pencaharian utama.

Pembangunan yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung mengadopsi keberhasilan program di negara-negara maju tapi S&T capacity yang dimiliki kurang memadai untuk mengimplementasikannya. Pendekatan ekonomi adalah *leverage factor* bukan tujuan dari pembangunan. Ketika ekonomi menjadi tujuan maka yang terjadi adalah distorsi atas kehidupan sosial dan politik masyarakat. Mekanisme pasar sebagai asumsi dasar pembangunan harus dicermati dengan memperhatikan kesiapan masyarakat. Ketidaksiapan berakibat kepada semakin terpuruknya masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai perubahan sosial bisa menimbulkan akibat negatif apabila tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Indonesia dengan potensi SDM yang baik seharusnya mampu untuk

mengembangkan model pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Indonesia memiliki keragaman yang besar dalam budaya lokal sehingga pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan harus variatif. Modifikasi budaya bisa dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan S&T capacity yang dikembangkan atau sebaliknya, dimana yang dikembangkan adalah *soft skill* yang sesuai dengan kearifan lokal. Merubah budaya tidak mudah tapi dengan melihat kebutuhan yang ada, keputusan untuk melakukan perubahan atau tidak harus didasarkan ada tidaknya nilai positif budaya bagi pembangunan.

Penutup

Kolaborasi dalam pembangunan bukanlah wacana baru. Namun kolaborasi yang disusun secara *bottom up* memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh manfaat yang lebih besar dalam pembangunan. Kondisi ini terbukti dengan keberhasilan Desh Limited Bangladesh yang berskala besar. Untuk usaha yang berskala kecil juga dapat diwujudkan dengan keberhasilan usaha batu bata di wilayah Pandeglang

Terbangunnya S&T capacity merupakan langkah penting dalam kolaborasi karena didalamnya terdapat *transfer of knowledge*. Transfer ini akan memperkuat *soft skill*

untuk melaksanakan pembangunan. Soft skill yang dimiliki sekaligus menjadi investasi di bidang S&T pada masyarakat. Stigma tentang masyarakat di Negara berkembang tidak mampu berinvestasi dalam S&T adalah keliru. Masyarakat mampu berinvestasi apabila sesuai dengan kemampuan maupun lingkungannya. Walaupun ada adopsi baru, sudah pasti membutuhkan adaptasi dan bukan stigma ketidakmampuan.

Pembentukan soft skill harus selaras dengan keragaman dan kearifan budaya lokal sehingga pembangunan tidak kontra produktif terhadap budaya. Adopsi S&T Negara maju di Negara berkembang kadang-kadang membawa budaya yang berbeda yang apabila tidak diimbangi budaya lokal akan berdampak negatif.

Daftar Pustaka

Andi Suruji, 2006, *Terlepasnya Sektor Riil dari Indikator Makro*, Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, diakses 18 Des 2006

Anonim, 2002, *Buku Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, SMERU research institute, www.smeru.or.id

Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Caroline S. Wagner et.al, 2001, *Science and Technology Collaboration: Building Capacity in Developing Countries?*, RAND

Report, RAND Science and Technology

Coralie Bryant dan Louise G White, 1989, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta

Detlev Holloh, 2001, *ProFI Microfinance Institutions Study*, ProFI, Denpasar,

M. Nasier Eskak, 2006, *Good Governance*, Presentasi Kuliah, tidak dipublikasikan

Pratikno, 2005, *Good Governance dan Governability*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8, No. 3, Maret 2005, UGM, Yogyakarta

Suwarsono dan Alvin Y. So, 1991, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

William Easterly, 2003, *The Elusive Quest for Growth*, MIT Press, USA

Biodata

Dwi Harsono, lahir di Purwokerto, 15 Januari 1974. Lulus sarjana jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1998. Saat ini menjadi pengajar pada program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, FISE UNY.